

EVALUASI KEBIJAKAN PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN ESSANG KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Maslin Matandatu

Salmin Dengo

Novva N. Plangitan

ABSTRACT: *The purpose of this study was to evaluate the results and impact of policy PNPM Rural in District Essang Talaud Islands. The method used is descriptive qualitative method. Informants were taken from PNPM Rural actors at the district level, the PNPM Rural actors at the village level, and the citizens Pokmas members in several villages. Informants who were interviewed as many as 10 people. Data collection techniques used were interviews. Data was analyzed using qualitative descriptive analysis techniques-interactive model of Miles and Hubermann.*

Based on research results ditariki conclusions: (1) The results of PNPM Rural in District Essang generally pretty good views of some aspects such as: the allocation and disbursement of funds, the management / implementation activities and the realization of the activities. (2) PNPM Rural in District Essang impact on poverty reduction seen from several aspects such as: penciptaan / increase empowerment of the economy of the poor, creation / enhancement of independence of the poor, realize or improve the quantity and quality of facilities prasanara basic social and economic community, increase the participation of the various parties in efforts to reduce poverty, and increase the welfare of society or of poor households.

Based on the results of this penellian then it can be recommended some suggestions as follows: (1) the PNPM Rural Policy would that be continued by the present government's. (2) The results of PNPM Mandiri in Rural Areas that have been created / materialized during cerned shall continue to be maintained and preserved to improve social welfare / poor households.

Keywords: Results and Impact of Policy, PNPM Mandiri.

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan di Indonesia bukan hanya menjadi fenomena yang terus aktual tetapi menjadi masalah yang belum pernah terpecahkan secara tuntas bahkan ada kecenderungan terus merosot atau mengalami peningkatan. Kenyataan tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk terus melakukan upaya terobosan penanggulangan kemiskinan dengan mencanangkan dan melaksanakan berbagai paket kebijakan/program. Pada era

pemerintahan Orde baru telah banyak program penanggulangan kemiskinan di pedesaan yang dilaksanakan seperti Program Bandes, Program Kredit Usaha Tani, Program Inpres Desa Tertinggal, dan lain-lain. Selanjutnya pada era reformasi (era pemerintahan Habibie, Gus Dur, dan Megawati) yaitu pada Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2006 dicanangkan dan dilaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan di pedesaan yang dinamakan

Program Pengembangan Kecamatan atau PPK. Kebijakan PPK ini di era pemerintahan SBY diganti dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal, dan PNPM Mandiri Perkotaan.

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Visi program ini adalah terciptanya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Tujuan umum program ini ialah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Sedangkan tujuan khusus program ini adalah : (1) meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan dalam pembangunan; (2) melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal; (3) mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif; (4) mengembangkan prasarana/sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat; (5) melembagakan pengelolaan dana bergulir; dan (6) mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keluaran (output) kebijakan/program yang diharapkan adalah : (1) terjadinya peningkatan keterlibatan rumah tangga miskin (RTM) dan kelompok perempuan; (2) terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa; (3) terjadinya peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif; (4) terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan

ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM; (5) terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa dalam pengelolaan pembangunan, (6) terjadinya peningkatan peranserta dan kerjasama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Kegiatan yang dibiayai melalui dana PNPM Mandiri Perdesaan ini adalah : (1) kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dasar yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat miskin; (2) kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk pendidikan nonformal; (3) kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumberdaya lokal; dan (4) penambahan permodalan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).

Kecamatan Essang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud yang menerima dana PNPM Mandiri Perdesaan pada setiap tahun sejak mulai dilaksanakannya program ini pada Tahun 2007 hingga berakhirnya program ini pada Tahun 2013. Pada Tahun 2007 sampai tahun 2009 Kecamatan Essang mendapat alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp.500 juta lebih. Pada Tahun 2010 (setelah pemekaran kecamatan) mendapat kucuran dana sebesar Rp.1,312 miliar lebih, Tahun 2011 sebesar Rp. 1,750 milyar, Tahun 2012 sebesar Rp. 1,750 milyar, dan terakhir Tahun 2013 sebesar Rp.700 juta. (*Sumber : Kantor Camat Essang, 2015*).

Total dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk Kecamatan Essang sejak Tahun 2007 sampai Tahun 2013 adalah sebesar lebih dari Rp.10,633 milyar. Dana PNPM Mandiri yang dialokasikan ke kecamatan Essang tersebut telah digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang diusulkan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) pada setiap desa, baik kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana sosial dasar dan ekonomi yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi

bagi masyarakat miskin, untuk kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumberdaya lokal, dan juga untuk permodalan bagi kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP).

Akan tetapi sejauh mana kebijakan PNPM Mandiri tersebut telah dapat memberikan hasil dan dampak kepada masyarakat Essang terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, masih perlu dilakukan penelitian ilmiah.

Pentingnya penelitian oleh karena sebagaimana diketahui bahwa selama ini banyak permasalahan dalam implementasi kebijakan PNPM Mandiri di berbagai daerah atau kecamatan sebagaimana sering diberitakan dalam media masa seperti : penggunaan dana untuk membiayai kegiatan di luar yang sudah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO), kegiatan/proyek fiktif, penyelewengan penggunaan dana oleh pejabat terkait ataupun oleh pelaksana kegiatan/proyek. Selain itu kenyataan sering dijumpai ada kegiatan yang dibiayai dana PNPM Mandiri seperti : pembangunan/perbaikan sarana dasar dan ekonomi yang tidak selesai bahkan terhenti pelaksanaannya karena kehabisan anggaran; kegiatan dana bergulir dan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan tidak berjalan dengan efektif bahkan ada yang tidak lagi berjalan.

Berbagai permasalahan dan penyimpangan pelaksanaan pada tingkat operasional tersebut menyebabkan kebijakan PNPM Mandiri tidak dapat memberikan hasil dan dampak optimal sebagaimana yang diharapkan. Atas pertimbangan hal-hal yang diuraikan di atas, maka penulis mengangkat tema/judul penelitian “Evaluasi kebijakan PNPM Mandiri perdesaan dikecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud”

METODE PENELITIAN

Dilihat dari segi tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui/mengevaluasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud, maka penelitian ini lebih memungkinkan apabila tingkat eksplanasi menggunakan metode penelitian kualitatif.

Menurut Moleong (2009), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Bungin (2010) mengatakan, penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Kemudian menurut Nasution (2001), dalam penelitian kualitatif, peneliti berpijak dari realitas atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian.

Cara pengukuran variabel penelitian biasanya dirumuskan dalam apa yang disebut definisi konsep dan definisi operasional. Definisi konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak : kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.

Dalam penelitian ini konsep yang menjadi fokus penelitian adalah kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu program pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di perdesaan secara terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan sejak tahun 2007 sampai tahun 2014 melalui pemberian dana Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan. Evaluasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dilihat dari “hasil dan dampak” dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin atau rumah tangga miskin. Yang dimaksud dengan “hasil” disini adalah hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan; sedangkan yang dimaksud dengan “dampak” adalah akibat yang dapat diwujudkan dari hasil tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat atau rumah tangga miskin.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber langsung dari informan penelitian. Selain data primer juga dikumpulkan data sekunder sebagai penunjang/pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis yang tersedia di lokasi penelitian.

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2009), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah “kata-kata dan tindakan”, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Pada penelitian kualitatif tidak ada pengambilan sampel sumber data secara acak, tetapi menggunakan teknik “*purposive*” atau pengambilan sumber data/informan bertujuan atau atas pertimbangan tertentu. Teknik *purposive* mempunyai ciri-ciri yaitu : jumlah sumber data/informan tidak dapat ditentukan terlebih dahulu, pemilihan sumber data/informan secara berurutan, penyesuaian berkelanjutan dari sumber data/informan, dan pemilihan sumber data/informan berakhir jika sudah terjadi pengulangan informasi (Moleong, 2009).

Sumber data (informan) dalam penelitian ini diambil dari unsur-unsur yang terkait langsung dengan pelaksanaan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan dan Desa, yaitu : (1) Unsur Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Desa (Kepala Desa, BPD, Tim Pengelola Kegiatan, dan pelaku lainnya); (2) Unsur Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan (Camat, Unit

Pengelola Kegiatan/UPK, Fasilitator Kecamatan, Pendamping Lokal, dan pelaku lainnya); (3) Unsur Masyarakat anggota Pokmas PNPM Mandiri Perdesaan yang menjadi sasaran kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, dan tpkoh masyarakat desa yang diambil pada beberapa Desa yang ada di wilayah kecamatan Essang.

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri, sedangkan metode/teknik pengumpulan datanya adalah pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan penelaahan dokumen (Moleong, 2009; Bungin, 2010). Adapun metode/teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*); yaitu digunakan untuk memperoleh data primer dari para informan. Pada wawancara ini digunakan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.
2. Pengamatan (Observasi); yaitu digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang terkait dengan fokus penelitian.
3. Studi Dokumen; yaitu digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersedia di lokasi penelitian yaitu kantor Camat Essang, Kantor Kepala Desa, dan UKP PNPM Mandiri Kecamatan Essang.

Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Menurut Sieddel (dalam Moleong, 2006), proses analisis data kualitatif terdiri dari : (1) mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, (2) mengumpulkan, memilah-milah, mengkasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, (3) berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

PEMBAHASAN

1. Letak dan Luas Wilayah

Kecamatan Essang merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2003 Kecamatan Essang merupakan kecamatan paling luas di Kabupaten Kepulauan Talaud, dimana wilayah Kecamatan Essang pada saat itu mencakup Desa Samudera (Kecamatan Essang Selatan) sampai Desa Lahu (Kecamatan Gemeh). Pada Tahun 2007 Kecamatan Essang dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Gemeh dan Kecamatan Essang. Pada Tahun 2009 Kecamatan Essang dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Essang dan Kecamatan Essang Selatan. Jadi, Kecamatan Essang telah dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Essang, Kecamatan Gemeh, dan Kecamatan Essang Selatan. Kecamatan Essang terletak dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Gemeh

Sebelah Selatan : Kecamatan Essang Selatan

Sebelah Timur : Hutan Negara

Luas wilayah Kecamatan Essang 94,26 Km², terbagi pada sebanyak 8 (delapan) Desa yang ada.

Tabel 1

Luas Wilayah Desa di Kecamatan Essang

No.	Desa	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Bulude	12,06	12,79
2.	Bulude Selatan	8,74	9,27
3.	Lalue Utara	11,76	12,48
4.	Lalue Tengah	10,25	10,87
5.	Lalue	11,27	11,96
6.	Essang	12,62	13,39
7.	Essang Selatan	13,84	14,68
8.	Maririk	13,72	14,56
Jumlah		94,26	100,00

Sumber : Kecamatan Essang Dalam Angka, 2015.

Tabel diatas menunjukkan bahwa luas desa-desa yang ada di wilayah kecamatan Essang tidak jauh berbeda yaitu antara 8,47 Km² sampai 13,84 Km². Desa yang paling luas adalah Desa Essang Selatan yaitu 13,84 Km² atau 14,68% dari luas wilayah Kecamatan Essang, disusul berturut-turut Desa Maririk 13,72 Km atau 14,56%, Desa Essang 12,62 Km atau 13,39%, Desa Bulude 12,06 Km atau 12,79%, Desa Lalue Utara 11,76 Km atau 12,48%, Desa Lalue 11,27 Km atau 11,96%, Desa Lalue Tengah 10,25 Km, dan yang paling kecil adalah Desa Bulude Selatan 8,74 Km atau 9,27%.

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Essang (Desember 2014) yaitu sebanyak 3.773 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.904 jiwa atau 50,46% dan perempuan sebanyak 1.869 jiwa atau 49,54%. Data mengenai jumlah penduduk Kecamatan Gemeh menurut jenis kelamin pada tiap-tiap desa dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2

Komposisi Jumlah Penduduk Kecamatan Essang menurut Jenis Kelamin pada Tiap Desa (Desember 2014)

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Bulude	310	287	597
2.	Bulude Selatan	233	225	458
3.	Lalue Utara	183	174	357
4.	Lalue Tengah	225	241	466
5.	Lalue	204	193	397
6.	Essang	214	208	422
7.	Essang Selatan	324	344	668
8.	Maririk	211	197	408

Sumber : Kecamatan Essang Dalam Angka, 2015

Data pada tabel 2. diatas memperlihatkan bahwa penyebaran jumlah penduduk pada tiap-tiap desa yang ada di kecamatan Essang tidak merata. Desa yang punya penduduk terbanyak adalah Desa Essang Selatan yaitu sebanyak 668 jiwa atau 17,70% dari total penduduk Kecamatan Essang, kemudian terbanyak kedua adalah penduduk Desa Bulude sebanyak 597 jiwa atau 15,82%, terbanyak ketiga penduduk Desa Lalue Tengah sebanyak 466 jiwa atau 12,35%, terbanyak keempat adalah penduduk Desa Bulude Selatan yaitu sebanyak 458 jiwa atau 12,14%, urutan terbanyak kelima penduduk Desa Essang yaitu sebanyak 422 jiwa atau 11,85% , terbanyak keenam adalah penduduk Desa Maririk yaitu sebanyak 4018 jiwa atau 10,81%, urutan terbanyak ketujuh adalah penduduk Desa Lalue yaitu sebanyak 397 jiwa atau 10,52%, dan paling sedikit adalah penduduk Desa Lalue Utara yaitu sebanyak 357 jiwa atau 9,46%.

Tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Essang adalah 40,03 jiwa per Km². Tingkat kepadatan penduduk pada tiap-tiap desa yang ada di wilayah Kecamatan Essang juga tidak sama, ada desa yang tingkat kepadatan penduduk mencapai di atas 50 jiwa per Km², ada desa yang tingkat kepadatan penduduk kurang dari 50 jiwa per Km², ada juga desa yang tingkat kepadatan penduduknya kurang dari 40 jiwa per Km². Data mengenai tingkat kepadatan penduduk pada tiap-tiap desa yang ada di wilayah Kecamatan Essang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Jumlah Penduduk, Luas, dan Kepadatan Penduduk
Di Kecamatan Essang
(Desember 2014)

No	Desa	Penduduk (Jiwa)	Luas (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Bulude	597	12,06	49,50
2	Bulude Selatan	458	8,74	52,40
3	Lalue Utara	357	11,76	30,35
4	Lalue Tengah	466	10,25	45,46
5	Lalue	397	11,27	35,22
6	Essang	422	12,62	33,44
7	Essang Selatan	668	13,84	48,26
8	Maririk	408	13,72	29,74

Sumber : Kecamatan Essang Dalam Angka, 2015

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa desa yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Desa Bulude Selatan yaitu sebanyak 52,40 jiwa per Km² , disusul Desa Bulude dengan tingkat kepadatan penduduk 49,50 jiwa Km², Desa Essang Selatan sebesar 48,26 jiwa per Km² , Desa Lalue Tengah sebesar 45,46 jiwa per Km² , Desa Lalue sebesar 35,22 jiwa per Km², Desa Essang sebesar 33,44 jiwa per Km², Desa Lalue Utara sebesar 30,35 jiwa per Km², dan paling kecil pada Desa Maririk sebesar 29,74 jiwa per Km².

Dilihat dari aspek agama, penduduk Kecamatan Essang mayoritas memeluk Agama Kristen Protestan, sebagian kecil lainnya ada yang memeluk Agama Katolik, dan Agama Islam. Keadaan sampai dengan Desember 2014 menunjukkan jumlah penduduk kecamatan Essang memeluk Agama Kristen Protestan ada sebanyak 3.539 jiwa atau 98,61% dari total jumlah penduduk, kemudian pemeluk Agama Katolik sebanyak 11 orang atau 0,31% dari total jumlah penduduk, dan pemeluk Agama Islam sebanyak 39 orang atau 1,07% dari total jumlah penduduk.

Pada Tabel 4 berikut ini dikemukakan komposisi jumlah penduduk menurut agama pada tiap desa di Kecamatan Essang.

Tabel 4
Komposisi Jumlah Penduduk Kecamatan Essang menurut Agama (Desember 2014)

No	Desa	Kristen Protestan	Kristen Katolik	Islam
1.	Bulude	592	5	-
2.	Bulude Selatan	444	-	14
3.	Lalue Utara	347	-	10
4.	Lalue Tengah	337	-	-
5.	Lalue	342	-	2
6.	Essang	412	-	8
7.	Essang Selatan	657	6	5
8.	Maririk	408	-	-

Sumber : Kecamatan Essang Dalam Angka, 2015

Penduduk Kecamatan Essang sebagian besar punya mata pencaharian sebagai petani, sebagian kecil lainnya ada yang bermata pencaharian sebagai nelayan, sebagai pedagang/pengusaha, dan lainnya bekerja sebagai PNS dan anggota TNI/POLRI. Komposisi jumlah penduduk kecamatan Essang menurut mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Komposisi Jumlah Penduduk Kecamatan Essang Menurut Mata Pencaharian (Desember 2014)

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	Petani	1.094	74,42
2.	Nelayan	135	9,18
3.	Pedagang/Pengusaha	110	7,48
4.	PNS	100	6,80
5.	TNI/POLRI	14	0,95
6.	Lainnya	17	1,16
Jumlah		1.470	100,00

Sumber : Kecamatan Essang Dalam Angka, 2015.

Data tentang komposisi jumlah penduduk menurut mata pencaharian pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa sebanyak 1.094 orang atau 74,42% dari jumlah penduduk Kecamatan Essang yang bekerja atau bermata pencaharian tetap adalah sebagai petani, 135 orang atau 9,18% bekerja sebagai nelayan, 110 orang atau 7,48% bekerja sebagai pedagang/pengusaha, 100 orang atau 6,80%, 14 orang atau 0,95% sebagai anggota TNI/Polri, dan 17 orang atau 1,16% bekerja pada sektor lainnya.

Dilihat dari tingkat kesejahteraan keluarga yang digunakan oleh BKKBN bahwa sebagian keluarga/rumah tangga yang ada di wilayah Kecamatan Essang masih tergolong pada tingkat Keluarga Prasejahtera, namun sudah ada keluarga/rumah tangga yang terkategori Keluarga Sejahtera III-Plus, seperti digambarkan pada Tabel 6

Tabel 6
Banyaknya Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan Di Kecamatan Essang Tahun 2014

No.	Tingkat Kesejahteraan	Banyaknya Keluarga	Persentase (%)
1.	Keluarga Prasejahtera	511	52,41
2.	Keluarga Sejahtera I	127	13,26
3.	Keluarga Sejahtera II	150	15,38
4.	Keluarga Sejahtera III	123	12,62
5.	Keluarga Sejahtera III-Plus	64	6,56
Jumlah		975	100,00

Sumber : Kecamatan Essang Dalam Angka, 2015

Data pada Tabel 6. menunjukkan bahwa sebanyak 52,41% keluarga yang ada di wilayah kecamatan Essang masih tergolong sebagai Keluarga Prasejahtera, kemudian 13,26% sebagai Keluarga Sejahtera Tahap I, sebanyak 15,38% sebagai Keluarga Sejahtera Tahap II, sebanyak 12,62% sebagai Keluarga Sejahtera

Tahap III, dan sebanyak 6,56% sudah tergolong Keluarga Sejahtera III-Plus.

3. Potensi Ekonomi

Potensi ekonomi wilayah Kecamatan Essang sangat tergantung pada sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan sektor perikanan laut. Komoditi pertanian tanaman pangan yang potensial di kecamatan Essang adalah tanaman jagung, ubi kayu dan ubi jalar, kacang, dan sayuran. Komoditi perkebunan yang menjadi unggulan adalah tanaman kelapa, cengkeh, dan pala. Sedangkan sektor perikanan yang menjadi unggulan adalah perikanan laut.

Tabel 7

Banyaknya Produksi Komoditi
Pertanian/Perkebunan di Kecamatan Essang

Tahun 2015

No.	Jenis Tanaman/Komoditi	Produksi (Ton)
1.	Jagung	12,0
2.	Ubi Kayu	190,0
3.	Ubi Jalar	190,0
4.	Kacang Tanah	9,3
5.	Durian	11,88
6.	Mangga	73,0
7.	Jeruk	9,8
8.	Salak	1,35
9.	Pepaya	2.535
10.	Rambutan	897
11.	Sayur-sayuran	132,0
12.	Cengkeh	45,0
13.	Pala	20,0
14.	Kelapa	270

Sumber : Kecamatan Essang Dalam Angka, 2015

4. Pemerintahan

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintahan kecamatan sekarang ini diatur dalam UU.Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 126) dan secara khusus diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; sedangkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun susunan organisasi pemerintah Kecamatan Essang adalah sebagai berikut :

- 1) Camat;
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan
- 3) Seksi-Seksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Pelayanan Umum
 - c. Seksi Keamanan dan Ketertiban
 - d. Seksi PMD/K
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional

Keadaan sampai dengan November 2015 menunjukkan jabatan sekretaris kecamatan, dan semua jabatan kepala seksi dan kepala subbagian pada kantor Camat Essang sudah terisi dengan pejabat definitif. Jumlah seluruh pegawai kantor Camat Essang sampai dengan November 2015 ada sebanyak 17 orang PNS. Komposisi jumlah PNS Kantor Camat Essang menurut tingkat pendidikan dan menurut golongan kepangkatan dapat dilihat pada tabel 6 dan tabel 8.

Tabel 4.8

Komposisi Jumlah PNS Kantor Camat Essang
Menurut Pendidikan
(November 2015)

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Persentase(%)
1.	Pascasarjana	0	0
2.	(S2)	5	29,41
3.	Sarjana (S1)	0	0
4.	Sarjana	9	52,94
5.	Muda/Diploma SMA/ sederajat SMP	3	17,65
Jumlah		17	100,00

Sumber : Daftar Nominatif PNS Kec.Essang, November 2015

Pada table 8 dapat dilihat bahwa dari 17 orang PNS Kantor Camat Essang, ada 5 orang (29,41%) berpendidikan sarjana/S1, kemudian 9 orang (52,94%) berpendidikan SMA, dan ada 3 orang (17,64%) berpendidikan SMP.

Tabel 9
Komposisi Jumlah PNS Kantor Camat Essang
Menurut Golongan Kepangkatan
(November 2015)

No	Golongan Kepangkatan	Jumlah Pegawai	Persentase(%)
1.	Golongan III/d	3	17,65
2.	Golongan III/c	4	23,53
3.	Golongan III/b	2	11,76
4.	Golongan III/a	0	0
5.	Golongan II/d	1	5,88
6.	Golongan II/c	0	0
7.	Golongan II/b	3	17,65
8.	Golongan II/a	2	11,76
9.	Golongan I/d	1	5,88
10	Golongan I/c	1	5,88
Jumlah		17	100,00

Sumber : Daftar Nominatif PNS Kecamatan Essang, November 2015

Data pada tabel 9 menunjukkan bahwa lebih separuh PNS Kantor Camat Essang yaitu sebanyak 9 orang (52,94%) adalah pegawai Golongan III yang terdiri dari Golongan IIId sebanyak 3 orang atau 17,65%, Golongan IIIC sebanyak 4 orang atau 23,53%, dan Golongan IIb sebanyak 2 orang atau 11,76%. Pegawai Golongan II ada sebanyak 6 orang atau 35,29% yang terdiri dari Golongan IId sebanyak 1 orang (5,88%), Golongan IIb sebanyak 3 orang (17,65%), Golongan IIa sebanyak 2 orang atau 11,76%. Pegawai Golongan I ada sebanyak 2 orang yang terdiri dari Golongan Id sebanyak 1 orang (5,88%) dan Golongan Ic sebanyak 1 orang (5,88%).

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian pada bagian pendahuluan dan metodologi penelitian bahwa studi evaluasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Essang

Kabupaten Talaud difokuskan pada “hasil” dan “dampak” dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan tersebut. Yang dimaksud dengan “hasil” disini adalah hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan; sedangkan yang dimaksud dengan “dampak” adalah akibat yang dapat diwujudkan dari hasil tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat atau rumah tangga miskin.

Sehubungan dengan tujuan penelitian tersebut maka dilakukan wawancara terhadap sejumlah pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Essang. Informan yang berhasil diwawancarai sebanyak 10 orang yaitu : (1) Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Kecamatan sebanyak 3 orang (Camat, Ketua Unit Pengelola Kegiatan/UPK, Fasilitator Kecamatan); (2) Pelaku PNPM Mandiri di Desa sebanyak 3 orang (Kepala Desa, BPD, Tim Pengelola Kegiatan); dan (3) Kelompok Masyarakat (POKMAS) sasaran program PNPM Mandiri Perdesaan, sebanyak 4 orang yang diambil pada empat Desa. Data/informasi yang didapat dari para informan tersebut dianggap cukup sehingga tidak dilakukan penambahan informan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para informan tersebut mulai dari besar dana PNPM yang diterima, program/kegiatan yang didanai, realisasi penggunaan dana, hasil kegiatan yang dapat dicapai, dan dampak dari dilaksanakannya kegiatan tersebut untuk meningkatkan keberdayaan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat miskin (daftar pertanyaan secara lengkap dapat dilihat pada bagian lampiran).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan adalah program nasional untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di perdesaan secara terpadu dan berkelanjutan. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian

masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.; sedangkan kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk mobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, (3) pengaktifan fungsi dan peran pemerintahan lokal, (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat, (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan. Sedangkan tujuan khususnya adalah : (a) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan; (b) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan terus mendayagunakan sumber daya lokal; (c) Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif; (d) Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat; (e) Melembagakan pengelolaan dana bergulir; (f) Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa; dan (g) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan. Keluaran PNPM Mandiri adalah : (a) terjadinya peningkatan keterlibatan rumah tangga miskin (RTM) dan kelompok perempuan; (b) terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa; (c) terjadinya peningkatan kapasitas

pemerintah desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif; (d) terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM; (e) terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa dalam pengelolaan pembangunan, (f) terjadinya peningkatan peranserta dan kerjasama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan selama ini di Kecamatan Essang secara umum dapat memberikan hasil yang cukup baik dilihat dari segi pengalokasian dan penyaluran dana, penggunaan dana, dan realisasi hasil kegiatan yang dicapai. Dana yang dialokasikan ke desa-desa sesuai dengan besar dana yang sudah disepakati dalam MAD Penetapan Usulan Kegiatan dan ditetapkan dengan Surat Penetapan Camat (OPC). Penyaluran dana PNPM Mandiri dilakukan mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen/Kementerian Dalam Negeri. Dana disalurkan langsung ke rekening UPK dan selanjutnya dicairkan ke Pokmas sesuai kebutuhan. Penggunaan dana oleh Pokmas umumnya sudah tepat atau sesuai dengan kegiatan yang ditetapkan di bawah pengawasan Badan Pengawas UPK. Berdasarkan hasil wawancara bahwa kegiatan-kegiatan yang didanai oleh PNPM Mandiri di Kecamatan Essang dapat dilaksanakan dengan cukup baik; realisasi hasil yang dicapai umumnya cukup baik meskipun ada yang tidak tepat pada waktu ditentukan. Keseluruhan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Essang dapat memberikan “hasil” yang cukup baik.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Essang tersebut memberikan dampak terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di kecamatan

tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya PNPM Mandiri Perdesaan telah dapat menciptakan dan meningkatkan “keberdayaan” masyarakat/rumah tangga miskin dalam pengambilan keputusan di desa baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. PNPM Mandiri Perdesaan juga telah dapat menciptakan dan meningkatkan kemandirian masyarakat/rumah tangga miskin dalam mengelola sumberdaya yang ada dilingkungannya untuk memperoleh pendapatan. PNPM Mandiri di Kecamatan Esaang juga dapat menciptakan pelebagaan pengelolaan dana bergulir yaitu terbentuknya kelompok-kelompok usaha dan simpan pinjam kelompok perempuan, namun diakui hal itu tidak maksimal karena sebagian kelompok dan anggotanya tidak dapat mengembalikan atau melunasi pinjaman modal yang diperoleh, sehingga perguliran dana tidak berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan. PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Essang dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat yang sangat membantu atau menunjang masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Essang juga dapat meningkatkan peranserta atau keterlibatan berbagai pihak (stakeholders) dalam penanggulangan kemiskinan, baik pemerintah setempat, masyarakat umum, dan juga rumah tangga miskin itu sendiri. PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Essang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat/rumah tangga miskin karena PNPM Mandiri Perdesaan dapat menciptakan lapangan kerja bagi warga miskin, dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana umum di desa yang diperlukan bagi kelancaran kegiatan usaha masyarakat miskin.

Secara keseluruhan hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa PNPM Mandiri Perdesaan dapat memberikan hasil dan dampak dalam upaya penanggulangan kemiskinan di

Kecamatan Essang. Walaupun hasil dan dampak yang dicapai dengan PNPM Mandiri Perdesaan tidak maksimal, namun secara umum PNPM Mandiri telah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Essang. Adanya PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan selama kurang lebih sepuluh tahun itu, tingkat kesejahteraan masyarakat atau keluarga miskin di Kecamatan Essang mengalami perbaikan atau peningkatan.

KESIMPULAN

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan kebijakan atau program nasional yang dilaksanakan sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui “hasil” dan dampak dari kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Essang. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Essang pada umumnya cukup baik dilihat dari beberapa aspek yaitu : pengalokasian dan penyaluran dana, pengelolaan/pelaksanaan kegiatan, dan realisasi capaian kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan.
2. PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Essang memberikan dampak dalam upaya penanggulangan kemiskinan dilihat dari beberapa aspek seperti : penciptaan/peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat miskin, penciptaan/peningkatan kemandirian masyarakat miskin, mewujudkan atau meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat, peningkatan peranserta berbagai pihak dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan hidup

masyarakat atau rumah tangga miskin.

SARAN

Bertolak dari hasil penellian ini maka dapatlah direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan selama kurang lebih sepuluh tahun (2007 sampai 2013) memberikan hasil dan dampak bagi terciptanya atau meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin, sehingga alangkah baiknya kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dilanjutkan oleh pemerintahan yang ada sekarang ini.
2. Walaupun kebijakan PNPM Mandiri di era pemerintahan sekarang ini sudah tidak ada lagi, namun hasil-hasil PNPM Mandiri yang telah tercipta/terwujud selama ini hendaklah terus dipelihara dan dilestarikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/rumah tangga miskin

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B.M.H., 2009, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Dunn, W.N., 2001, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : UGM Press.
- Islamy, M.I. 1996, *Kebijakan Publik*, Model-UT, Karunika-UT, Jakarta.
- Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Redoskarya, Bandung.

Nasution, 2001, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito.

Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung, Alfabeta.